

Selewengkan Anggaran Negara,

8.000 WN Tiongkok Dihukum

U-5 | Minggu, 24 Desember 2017 | 6:41

<http://sp.beritasatu.com/home/selewengkan-anggaran-negara-8000-wn-tiongkok-dihukum/122009>



Ilustrasi korupsi. [google]

Berita Terkait

- Kasus Rina Iriani Selesai setelah 4 Kajati
- Kajati NTT Dukung Pemeriksaan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo
- Mantan Wali Kota Kupang Daniel Adoe Divonis 2,6 Tahun Penjara
- Bupati dan Ketua DPRD Rote Ndao Ditetapkan Jadi Tersangka
- Korupsi Dana Hibah Rp 2,2 M, Kepala SMP di Tangerang Divonis Tiga Tahun Penjara

[SHANGHAI] Tiongkok telah menghukum 8.123 orang karena melakukan pelanggaran fiskal setelah melakukan audit anggaran pemerintah 2016 yang dikeluarkan untuk mengungkapkan banyak masalah

Hu Zejun, Kepala Kantor Audit Nasional, mengumumkan pelanggaran tersebut saat memberikan pengarahan kepada anggota parlemen pada Sabtu (23/12). Namun Hu tidak memberikan rincian tentang hukuman yang dihadapi para pelanggar.

Pada Sabtu (23/12), kantor berita Xinhua melaporkan kampanye anti-korupsi yang meluas di Tiongkok juga bertujuan untuk membasmi korupsi yang menggerogoti Partai Komunis yang berkuasa. Korupsi ini termasuk penyalahgunaan atau penggelapan dana pemerintah yang telah menjerat lebih dari 1,3 juta pejabat.

Hu mengatakan bahwa dari sebagian pelanggar, 970 orang dihukum karena menyalahgunakan dana yang diperuntukkan bagi kampanye pengentasan kemiskinan. Dana dimaksudkan untuk mengentaskan semua orang miskin di daerah pedesaan pada tahun 2020.

Dikatakan, sekitar 48 miliar yuan (US \$ 7,30 miliar) dana yang dialokasikan untuk proyek perumahan yang terjangkau telah diabaikan selama lebih dari setahun. Sementara dana binaan 1,37 miliar yuan lainnya dikembalikan.

Hu mengatakan sebanyak 1.363 orang lainnya dihukum karena penyimpangan dalam penggunaan dana yang dimaksudkan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau. Sekitar 800 orang di perusahaan milik negara dan 73 orang di delapan bank besar ditemukan melakukan pelanggaran, termasuk 505 orang yang dihukum karena malpraktik yang melibatkan dana asuransi kesehatan. [Reuters/U-5]